POHON KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Terwujudnya pemari DPD RI sesuai aspirasi daerah

Pelaksanaan tugas responsibel dan daerah yang mandiri pada DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RI (K.1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI dan RUU Usul Perseorangan yang ditindaklanjuti oleh RUU Usul Parsemarind atau DPR (S.1) Nilai kualitas RUU Usul Perseorangan yang ditindaklanjuti (S.2) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU Usul Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.3)

Meningkatnya kualitas pengawasan (K.2) Nilai kualitas hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh DPD RI dan Nilai kualitas hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh Parsemarind atau DPR yang ditindaklanjuti (S.4) Nilai kualitas pengawasan atas Otonomi daerah dan Pajak Daerah (S.5) Nilai kualitas hasil pengawasan atas Otonomi daerah dan Pajak Daerah yang ditindaklanjuti (S.6)

Terwujudnya publik tata kelola DPD RI yang efektif (K.3) Nilai Reformasi Birokrasi DPD (S.7)

PK Kaderisasi Anggota DPD RI yang Berkualitas

PK Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang Prima

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang ditindaklanjuti DPR RI (K.1.1) Nilai kualitas dokumen hasil sinkronisasi RUU Usul Perseorangan yang ditindaklanjuti oleh Komisi DPR (S.1.1)

Meningkatnya kualitas pendapat dan pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR (K.1.2) Nilai kualitas dokumen hasil pendapat dan pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR yang ditindaklanjuti (S.1.2) Nilai kualitas dokumen Hasil Pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR yang ditindaklanjuti (S.1.3)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Perseorangan (K.1.3) (K.1.3) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.4) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.5)

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.4) (K.1.4) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.6) Nilai kualitas dokumen hasil pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (S.1.7)

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU (K.2.1) Nilai kualitas dokumen hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh DPD RI (S.1.8) Nilai kualitas dokumen hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh ESDMDA (S.1.9)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan partisipasi terhadap pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.2) (K.2.2) Nilai kualitas dokumen hasil pendapat atas pelaksanaan UU oleh ESDMDA (S.1.10) Nilai kualitas dokumen hasil pendapat atas pelaksanaan UU oleh ESDMDA (S.1.11)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.3) (K.2.3) Nilai kualitas dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.12)

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.4) (K.2.4) Nilai kualitas dokumen hasil pemeriksaan dan evaluasi Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.13)

Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI (K.3) (K.3) Nilai RB Kanwil (S.1.14)

Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola Sekjen DPD RI (K.3.1) Nilai capaian RB Sekjen (S.1.15) Nilai capaian RB Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga (S.1.16) Nilai capaian RB Biro Umum (S.1.17) Nilai capaian RB Biro Keuangan (S.1.18) Nilai capaian RB Biro Hukum (S.1.19) Nilai capaian RB Biro Humas dan Informasi publik (S.1.20) Nilai capaian RB Biro Sumber Daya Manusia (S.1.21) Nilai capaian RB Biro Sarana dan Prasarana (S.1.22) Nilai capaian RB pengawasan internal (S.1.23) Nilai capaian RB pengawasan eksternal (S.1.24)

Meningkatnya nilai akuntabilitas pemerintah/akuntabilitas kinerja pemerintah (K.3.2) Nilai RB Sekretariat (S.1.25)

PK Dalam Lily Kinerja Tetap

PK Dalam Lily Kinerja Tetap

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (K.1.1) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU usul inisiatif yang dibutuhkan (S.1.1)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk RUU usul Parsemarind atau DPR (K.1.2) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU usul Parsemarind atau DPR yang dibutuhkan (S.1.2)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pendapat dan pertimbangan atas RUU Usul Parsemarind atau DPR (K.1.3) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Usul Parsemarind atau DPR yang dibutuhkan (S.1.3)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan (K.1.4) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.4)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.5) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.5)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.6) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.6)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Perseorangan Pajak, Pendidikan dan Agama (K.1.7) Nilai ketersediaan dokumen bahan legislasi RUU Perseorangan yang dibutuhkan (S.1.7)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.1) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.8)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.2) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.9)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.3) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.10)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pelaksanaan UU oleh ESDMDA (K.2.4) Nilai ketersediaan dokumen bahan pelaksanaan UU oleh ESDMDA yang dibutuhkan (S.1.11)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.5) Nilai ketersediaan dokumen bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.12)

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah (K.2.6) Nilai ketersediaan dokumen bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi atas Pertanahan dan Pajak Daerah oleh Komisi yang ditindaklanjuti (S.1.13)

Meningkatnya efektivitas sistem dan tata kelola Sekjen DPD RI (K.3.1) Nilai capaian RB Sekjen (S.1.14) Nilai capaian RB Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga (S.1.15) Nilai capaian RB Biro Umum (S.1.16) Nilai capaian RB Biro Keuangan (S.1.17) Nilai capaian RB Biro Hukum (S.1.18) Nilai capaian RB Biro Humas dan Informasi publik (S.1.19) Nilai capaian RB Biro Sumber Daya Manusia (S.1.20) Nilai capaian RB Biro Sarana dan Prasarana (S.1.21) Nilai capaian RB pengawasan internal (S.1.22) Nilai capaian RB pengawasan eksternal (S.1.23)

Meningkatnya kualitas consc untuk mengurus, mendjaga dan mengelola pemnagatan tata kelola pemerintah yang baik (K.3.2) Nilai RB Sekretariat (S.1.24) Nilai capaian RB Biro Umum (S.1.25) Nilai capaian RB Biro Keuangan (S.1.26)

PK Kaderisasi Anggota DPD RI yang Berkualitas

PK Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang Prima

Terlaksanaanya kualitas konsultasi dan daerah yang berkualitas untuk legislasi (K.1.1) (K.1.1) ESDMDA yang bergerak DPD RI, (S.1.1) ESDMDA dan Nasta DPD RI, (S.1.2) Persentase Rekomendasi hasil kunjungan kerja anggota DPD RI yang ditindaklanjuti oleh Komisi dan Kementerian/Lembaga (S.1.3) Kunjungan Kerja (S.1.4)

Terlaksanaanya hasil analisis bahan legislasi (Akademik usulan dokumen usulan legislasi) (K.1.2) (K.1.2) Hasil analisis bahan legislasi (Akademik usulan dokumen usulan legislasi) (S.1.5) Persentase hasil analisis bahan legislasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.6) Persentase hasil analisis bahan legislasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.7)

Terlaksanaanya kunjuan konsultasi (K.1.3) (K.1.3) Jaring Hal Lain yang Kita dengan Kunjuan konsultasi (S.1.8) Kunjuan konsultasi (S.1.9)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.1) (K.2.1) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.10) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.11)

Terlaksanaanya hasil analisis bahan pelaksanaan UU (K.2.2) (K.2.2) Hasil analisis bahan pelaksanaan UU (S.1.12) Persentase hasil analisis bahan pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.13) Persentase hasil analisis bahan pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.14)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.3) (K.2.3) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.15) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.16)

Terlaksanaanya hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan (K.2.4) (K.2.4) Hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan (S.1.17) Persentase hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.18) Persentase hasil analisis bahan usul dan pendapat dan pertimbangan yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.19)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.5) (K.2.5) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.20) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.21)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.6) (K.2.6) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.22) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.23)

Terwujudnya sl yang pengawasan atas pelaksanaan UU (K.2.7) (K.2.7) Laporan Laporan (S.1.24) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.25) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.26)

Terlaksanaanya laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (K.2.8) (K.2.8) Laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (S.1.27) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.28) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.29)

Terlaksanaanya pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (K.2.9) (K.2.9) Laporan hasil pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (S.1.30) Identifikasi dan penentuan regulasi yang akan dibuat oleh Komisi dan Kementerian/Lembaga (S.1.31)

Terlaksanaanya hasil pendata (Inventarisasi Pendapat) (K.2.10) (K.2.10) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.32) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.33)

Terlaksanaanya pengaduan Konsultasi Keluhan dan Saran yang dapat ditindaklanjuti (K.2.11) (K.2.11) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.34) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.35)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.12) (K.2.12) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.36) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.37)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.2.13) (K.2.13) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.38) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.39)

Terlaksanaanya sistem informasi dan Pengelolaan Data (K.3.1) (K.3.1) Sistem Informasi dan Pengelolaan Data (S.1.40) Persentase proyeksi pengelolaan data (S.1.41) Persentase proyeksi pengelolaan data (S.1.42)

Terlaksanaanya Monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (K.3.2) (K.3.2) Monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.43) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.44) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.45)

Terlaksanaanya ESDMDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (K.3.3) (K.3.3) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.46) Persentase hasil monitoring dan evaluasi atas Responsibel dan daerah yang mandiri (S.1.47)

Terlaksanaanya hasil pendata (Inventarisasi Pendapat) (K.3.4) (K.3.4) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.48) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.49)

Terlaksanaanya pengaduan Konsultasi Keluhan dan Saran yang dapat ditindaklanjuti (K.3.5) (K.3.5) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.50) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.51)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.6) (K.3.6) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.52) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.53)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.7) (K.3.7) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.54) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.55)

Terlaksanaanya sl yang pengawasan atas pelaksanaan UU (K.3.8) (K.3.8) Laporan (S.1.56) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.57) Persentase laporan yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.58)

Terlaksanaanya laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (K.3.9) (K.3.9) Laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU (S.1.59) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.60) Persentase laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.61)

Terlaksanaanya pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (K.3.10) (K.3.10) Laporan hasil pengawasan Otonomi daerah dan Pajak Daerah (S.1.62) Identifikasi dan penentuan regulasi yang akan dibuat oleh Komisi dan Kementerian/Lembaga (S.1.63)

Terlaksanaanya hasil pendata (Inventarisasi Pendapat) (K.3.11) (K.3.11) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.64) Persentase hasil dari pengawasan dan pendapat yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.65)

Terlaksanaanya pengaduan Konsultasi Keluhan dan Saran yang dapat ditindaklanjuti (K.3.12) (K.3.12) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan internal (S.1.66) Persentase hasil dari pengaduan dan konsultasi yang dapat dikaji oleh pemohonan eksternal (S.1.67)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.13) (K.3.13) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.68) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.69)

Terlaksanaanya rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (K.3.14) (K.3.14) Rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA untuk pendapat dan pertimbangan (S.1.70) Persentase rekomendasi kebijakan atau tabulasi data ESDMDA yang ditindaklanjuti (S.1.71)

Terlaksanaanya pengelolaan Sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (K.3.15) (K.3.15) Pengelolaan sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (S.1.72)

Terlaksanaanya pengelolaan sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (K.3.16) (K.3.16) Pengelolaan sarana dan prasarana secara standar di Sekretariat Jenderal (S.1.73)

Terlaksanaanya pengawasan internal yang berkualitas (K.3.17) (K.3.17) Hasil pengawasan internal yang berkualitas (S.1.74) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.75) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.76) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.77)

Terlaksanaanya pengawasan eksternal yang berkualitas (K.3.18) (K.3.18) Hasil pengawasan eksternal yang berkualitas (S.1.78) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.79) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.80) Persentase temuan atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (S.1.81)

Output

Output

POHON KINERJA
DEPUTI ADMINISTRASI DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif
IK : 1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) (S_{ss})

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

PK Pimpinan Lembaga / Eselon I.a / Kinerja Strategis

Meningkatnya efektivitas tata kelola DPD RI
IK : Nilai RB General (P_{ss})

Meningkatnya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah
IK : Nilai RB Tematik (P_{ss})

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

Meningkatnya efektifitas sistem dan tata kelola Setjen DPD RI IK : 1) Nilai capaian RB pengelolaan organisasi (K_{ss}), 2) Nilai capaian RB pengelolaan SDM (K_{ss}), 3) Nilai capaian RB pengelolaan kinerja (K_{ss}), 4) Nilai capaian RB pengelolaan keuangan (K_{ss}), 5) Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan (K_{ss}), 6) Nilai capaian RB pelayanan informasi publik (K_{ss}), 7) Nilai capaian RB pelayanan informasi publik di daerah pemilihan (K_{ss}), 8) Nilai capaian RB pengelolaan layanan umum, sarana prasana di kantor pusat (K_{ss}), 9) Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di kantor ibukota provinsi (K_{ss}), 10) Nilai capaian RB pengawasan Internal (K_{ss})

Meningkatnya kualitas upaya untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemrintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Nilai capaian RB upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (K_{ss})

PK Eselon II / Kinerja Operasional

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi
IK : 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General, 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, 3) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, 4) Indeks Pelayanan Publik, 5) Indeks Kualitas Kebijakan, 6) Survei Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia yang profesional
IK : 1) Indeks sistem merit, 2) Indeks berAKHLAK

Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas
IK : 1) Nilai SAKIP, 2) Indeks perencanaan pembangunan nasional (IPPN)

Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
IK : 1) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, 2) Opini BPK

Terlaksananya pengelolaan prioritas nasional
IK : 1) Capaian Prioritas Nasional, 2) Capaian IKU Kementerian/Lembaga

Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan
IK : 1) Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik/Tingkat implementasi kebijakan arsitektur pemerintahan digital, 2) Tingkat digitalisasi arsip, 3) Indeks pembangunan statistik, 4) Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital

Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif
IK : 1) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan, 2) Indeks pelayanan publik

Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif di daerah pemilihan
IK : 1) Indeks pelayanan publik di kantor daerah

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di Ibukota Negara
IK : 1) Indeks pengelolaan aset,

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di Ibukota provinsi
IK : 1) Indeks tata kelola pengadaan

Terlaksananya pengawasan internal yang independen
IK : 1) Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), 2) Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas (ZI), 3) Tingkat tindak lanjut rekomendasi, 4) Survei penilaian integritas

Terlaksananya upaya mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat
IK : 1) Pengentasan kemiskinan / Peningkatan kemiskinan, 2) Realisasi investasi / Peningkatan Investasi, 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus penanganan stunting/Digitalisasi administrasi pemerintahan, 4) Penguatan produk dalam negeri / Pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi, 5) Laju inflasi/Percepatan prioritas aktual presiden

Output

Output
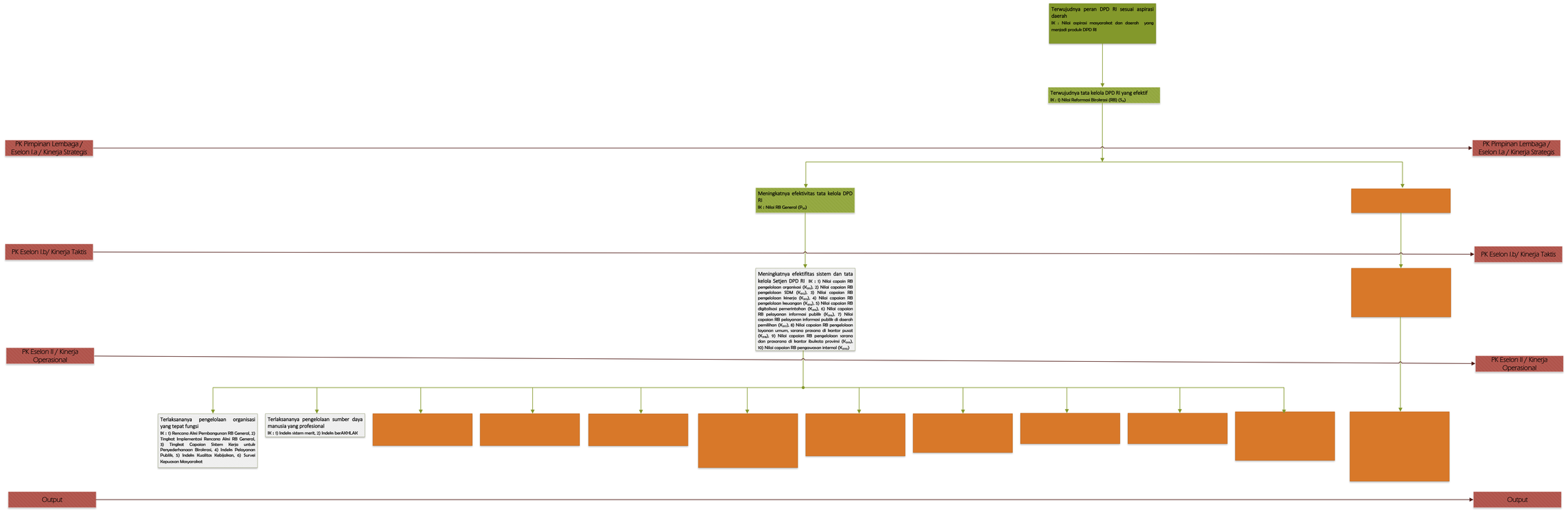
POHON KINERJA
BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DPD RI